



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN – I



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

Tahun 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I KINERJA	1
A. Target indikator Kinerja Utama.....	4
B. Capaian indikator Kinerja.....	6
C. Program dan Kegiatan.....	10
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	51
A. Permasalahan	51
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	53
BAB III PENUTUP	55
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2026. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.

Hasil capaian kinerja sasaran triwulan merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja dan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhir kata, kami berharap melalui Laporan Kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang. sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 09 April 2026



DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SURYANTO, Aks., M.Si
NIP. 19730108 199403 1 006

DINAS P3A-PPKB	
SEK/KABID	<i>[Signature]</i>
KA. SUB BAG/SEKSI	
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

BAB I KINERJA

A. Target Indikator Kinerja Utama

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 Triwulan I serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat Target Tahun 2026 masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Nilai Sakip	Angka	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15
3	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	4	3,50	3,50	3,50	4
4	Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
5	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	0	4	81	4
6	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	90	90	90
9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	90	90	90
10	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
11	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
12	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
13	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9
14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	angka	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41
15	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	21	21	21	21	21
16	Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,81	88,81	88,81	88,81	88,81
17	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
18	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8	8	8	8	8
19	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
20	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	62,64	62,64	62,64	62,64	62,64
21	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88
22	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35

B. Capaian Indikator Kinerja

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I Tahun 2026 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN I		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Angka	80,35	80,35	80,25	99,875
2	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,15	89,15	90,04	100,99
		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	4	3,50	1,49	42,57
		Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,4	18,4	2.179 963	188,15
		Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	0	0	0
3	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam	persen	78,57	78,57	63,64	80,997

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN I		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		KLA					
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55	67,55	67,55	100
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,48	3,48	0,205128	194,11
4	Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	100	111
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	100	111
5	Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,23	2,23	2,22	99,55
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,2	38,2	38,9	98,20

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN I		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,9	57,9	63,6	109,8
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	angka	66,41	66,41	71,0	106,9
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	21	21	20,3	96,99
		Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,8	88,8	90	101,3
		Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,44	8,44	11,0	76,81
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8	8	7,6	95

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN I		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,7	62,7	67,9	108,2
		Indeks Lansia Berdaya	Indeks	62,64	62,64	69,9	111,59
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,88	86,88	81,5	94,92
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	26,35	26,35	23,93	90,81
Total skor:		2218,762					
Rata-rata:		100,85 %					

C. Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. Program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/URUSAN/SUB URUSAN/ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			Tahun 2026					
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Total sesuai Surat Edaran 050/027.1/TAPD/2025 5 Tanggal 15 Agustus 2025	Total sesuai Surat Edaran 050/ 042 /TAPD/2025 5 Tanggal 29 Desember 2025	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			<u>21.329.909.105,10</u>	<u>13.763.776.812,90</u>	<u>11.336.653.266,90</u>	<u>-2.427.123.546,00</u>	
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100%	16.677.131.562,10	12.361.906.812,90	10.288.124.928,63	-2.073.781.884,27	
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	539.205.000,00	388.437.000,00	343.577.799,07	-44.859.200,93	

		Perangkat Daerah (%)						
	2.08.01.1.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	146.037.000,00	75.757.000,00	87.423.001,86	11.666.001,86	
	2.08.01.1.01.00 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	28.000.000,00	50.000.000,00	58.873.768,21	8.873.768,21	
	2.08.01.1.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	42.015.000,00	33.527.000,00	56.557.594,00	23.030.594,00	
	2.08.01.1.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	323.153.000,00	229.153.000,00	140.723.435,00	- 88.429.565,00	
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	9.509.381.769,00	8.090.432.154,27	8.073.576.115,27	- 16.856.039,00	
	2.08.01.1.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan Orang/Bulan	9.409.336.769,00	8.056.287.654,27	8.056.287.654,27	-	
	2.08.01.1.02.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.838.000,00	5.161.500,00	3.550.061,00	- 1.611.439,00	

	2.08.01.1.02.00 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	89.207.0 00,00	28.983.000 ,00	13.738.400, 00	- 15.244. 600,00	
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	42.459.0 00,00	35.000.000 ,00	31.816.430, 00	- 3.183.5 70,00	
	2.08.01.1.03.00 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	42.459.0 00,00	35.000.000 ,00	31.816.430, 00	- 3.183.5 70,00	
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	267.778. 000,00	67.733.000 ,00	-	- 67.733. 000,00	
	2.08.01.1.05.00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	267.778. 000,00	67.733.000 ,00		- 67.733. 000,00	
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	3.686.89 6.457,10	2.267.930. 230,63	525.327.03 0,57	- 1.742.6 03.200, 06	
	2.08.01.1.06.00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.0 00,00	20.000.000 ,00	20.000.000, 00	-	
	2.08.01.1.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	711.462. 457,00	583.053.43 0,53	141.238.05 6,12	- 441.81 5.374,4 1	
	2.08.01.1.06.00 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	73.640.0 00,00	73.640.000 ,00	44.956.974, 45	- 28.683. 025,55	
	2.08.01.1.06.00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.0 00,00	-	-	-	

	2.08.01.1.06.00 08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	65.000.0 00,00	25.000.000 ,00	13.255.000, 00	- 11.745. 000,00	
	2.08.01.1.06.00 09 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.656.76 0.000,10	1.466.236. 800,10	208.677.00 0,00	- 1.257.5 59.800, 10	
	2.08.01.1.06.00 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokume n	133.034. 000,00	100.000.00 0,00	97.200.000, 00	- 2.800.0 00,00	
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	779.782. 336,00	-	-	-	
	2.08.01.1.07.00 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	14 Unit	529.782. 336,00	-	-	-	
	2.08.01.1.07.00 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000. 000,00	-	-	-	
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya a Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1.227.41 5.000,00	1.276.028. 028,00	1.077.481.1 53,72	- 198.54 6.874,2 8	
	2.08.01.1.08.00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.800.0 00,00	10.000.000 ,00	6.701.405,0 0	- 3.298.5 95,00	
	2.08.01.1.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.000. 000,00	246.367.90 8,00	246.367.90 8,00	-	
	2.08.01.1.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	866.615. 000,00	1.019.660. 120,00	824.411.84 0,72	- 195.24 8.279,2	

	Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					8	
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	624.214.000,00	236.346.400,00	236.346.400,00	-	
	2.08.01.1.09.00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	199.214.000,00	161.346.400,00	161.346.400,00	-	
	2.08.01.1.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
	2.08.01.1.09.00 09 Pemeliharaan/R ehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000,00	-	-	-	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	40	1.752.700.000,00	320.000.000,00	239.922.849,30	- 80.077.150,70	
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	280.500.000,00	65.000.000,00	21.895.068,00	- 43.104.932,00	
	2.08.02.1.01.00 05 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2 Kebijakan	66.500.000,00	15.000.000,00	4.999.500,00	- 10.000.500,00	

	2.08.02.1.01.00 09 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraa n PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggara an PUG kewenangan provinsi	1 Laporan	53.000.0 00,00	15.000.000 ,00	4.751.820,0 0	- 10.248. 180,00	
	2.08.02.1.01.00 10 Bimbingan Teknis Penyelenggaraa n PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	100 Orang	103.500. 000,00	15.000.000 ,00	5.232.488,0 0	- 9.767.5 12,00	
	2.08.02.1.01.00 11 Pendampingan Penyelenggaraa n PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	50 Lembag a	57.500.0 00,00	20.000.000 ,00	6.911.260,0 0	- 13.088. 740,00	
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakata n Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaa n Perempuan Bidang Politik,Hukum ,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyaraka tan Kewenangan Provinsi	1	1.393.70 0.000,00	240.000.00 0,00	213.342.81 1,30	- 26.657. 188,70	
	2.08.02.1.02.00 05 Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	9 Lembag a	38.700.0 00,00	15.000.000 ,00	6.099.819,3 0	- 8.900.1 80,70	
	2.08.02.1.02.00 08 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 Orang	1.280.00 0.000,00	210.000.00 0,00	203.108.96 0,00	- 6.891.0 40,00	Dana Hibah 1. BOK W RP 100.0 00.00 0 2. Dhar ma Wanit a Rp.10 0.000. 000

2.08.02.1.02.00 09 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 Orang	75.000.000,00	15.000.000,00	4.134.032,00	- 10.865.968,00	
2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	78.500.000,00	15.000.000,00	4.684.970,00	- 10.315.030,00	
2.08.02.1.03.00 08 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	78.500.000,00	15.000.000,00	4.684.970,00	- 10.315.030,00	
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	92,5	1.563.940.000,00	424.405.000,00	303.103.258,97	- 121.301.741,03	
2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	1	520.522.000,00	79.000.000,00	27.451.655,00	- 51.548.345,00	
2.08.03.1.01.00 03 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	154.056.000,00	21.500.000,00	6.551.665,00	- 14.948.335,00	

2.08.03.1.01.00 04 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	25 Orang	64.500.000,00	11.250.000,00	4.166.665,00	- 7.083.335,00	
2.08.03.1.01.00 05 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Laporan	36.450.000,00	7.750.000,00	3.556.665,00	- 4.193.335,00	
2.08.03.1.01.00 06 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	111.460.000,00	16.500.000,00	5.993.330,00	- 10.506.670,00	
2.08.03.1.01.00 07 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	4 Kegiatan	154.056.000,00	22.000.000,00	7.183.330,00	- 14.816.670,00	
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	430.800.000,00	192.525.000,00	171.184.564,62	- 21.340.435,38	
2.08.03.1.02.00 03 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban	5 orang	8.800.000,00	3.600.000,00	1.950.000,00	- 1.650.000,00	

		Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
	2.08.03.1.02.00 04 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	17.000.000,00	14.400.000,00	9.000.000,00	- 5.400.000,00	
	2.08.03.1.02.00 05 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	180.000.000,00	40.000.000,00	39.277.800,00	- 722.200,00	
	2.08.03.1.02.00 07 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	47.000.000,00	24.525.000,00	20.331.690,00	- 4.193.310,00	
	2.08.03.1.02.00 08 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	160.000.000,00	60.000.000,00	50.625.074,62	- 9.374.925,38	

2.08.03.1.02.00 09 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	18.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	612.618.000,00	152.880.000,00	104.467.039,35	-48.412.960,65	
2.08.03.1.03.00 05 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	80 Orang	167.000.000,00	111.880.000,00	90.451.579,35	-21.428.420,65	
2.08.03.1.03.00 06 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	10 Dokumen	156.056.000,00	10.098.835,00	2.716.065,00	-7.382.770,00	
2.08.03.1.03.00 07 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1 Laporan	37.450.000,00	7.500.000,00	1.191.665,00	-6.308.335,00	

2.08.03.1.03.00 08	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	10 Lembaga	126.056.000,00	12.500.000,00	1.691.665,00	- 10.808.335,00	
2.08.03.1.03.00 09	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10 Lembaga	126.056.000,00	10.901.165,00	8.416.065,00	- 2.485.100,00	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan		50	257.059.094,00	21.150.000,00	6.339.480,00	- 14.810.520,00	
2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)		1	257.059.094,00	21.150.000,00	6.339.480,00	- 14.810.520,00	
2.08.04.1.01.00 04	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	147.544.590,00	9.450.000,00	2.859.960,00	- 6.590.040,00	
2.08.04.1.01.00 07	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan	50 Lembaga	109.514.504,00	11.700.000,00	3.479.520,00	- 8.220.480,00	

	kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	14	189.278.449,00	48.850.000,00	34.664.890,00	-14.185.110,00	
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1	189.278.449,00	48.850.000,00	34.664.890,00	-14.185.110,00	
	2.08.05.1.01.00 03 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 Dokumen	72.544.590,00	9.100.000,00	2.898.160,00	-6.201.840,00	
	2.08.05.1.01.00 05 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	116.733.859,00	39.750.000,00	31.766.730,00	-7.983.270,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	12	390.000.000,00	153.000.000,00	74.067.860,00	-78.932.140,00	
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	85,71	222.000.000,00	60.000.000,00	25.559.920,00	-34.440.080,00	

	dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	2.08.06.1.01.00 07 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50 Lembaga	150.000.000,00	40.000.000,00	18.447.360,00	- 21.552.640,00	
	2.08.06.1.01.00 08 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Laporan	72.000.000,00	20.000.000,00	7.112.560,00	- 12.887.440,00	
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1	168.000.000,00	93.000.000,00	48.507.940,00	- 44.492.060,00	
	2.08.06.1.02.00 07 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	168.000.000,00	93.000.000,00	48.507.940,00	- 44.492.060,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	65	499.800.000,00	434.465.000,00	390.430.000,00	- 44.035.000,00	
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang	1	244.000.000,00	135.300.000,00	107.509.180,00	- 27.790.820,00	

	Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	melibatkan para pihak						
	2.08.07.1.01.00 07 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50 Lembaga	74.000.000,00	120.800.000,00	103.000.000,00	- 17.800.000,00	
	2.08.07.1.01.00 10 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Laporan	170.000.000,00	14.500.000,00	4.509.180,00	- 9.990.820,00	
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1	255.800.000,00	299.165.000,00	282.920.820,00	- 16.244.180,00	
	2.08.07.1.02.00 08 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	105.000.000,00	124.525.000,00	122.430.820,00	- 2.094.180,00	
	2.08.07.1.02.00 10 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	108.000.000,00	83.500.000,00	80.000.000,00	- 3.500.000,00	

	2.08.07.1.02.00 11 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	16.000.000,00	25.200.000,00	16.200.000,00	- 9.000.000,00	
	2.08.07.1.02.00 12 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	8.800.000,00	5.940.000,00	4.290.000,00	- 1.650.000,00	
	2.08.07.1.02.00 14 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	18.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
2	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		-	<u>1.771.500.000,00</u>	<u>270.000.000,00</u>	<u>245.721.330,08</u>	<u>- 24.278.669,92</u>	-
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	1,96	229.000.000,00	21.900.000,00	16.503.912,96	- 5.396.087,04	
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	229.000.000,00	21.900.000,00	16.503.912,96	- 5.396.087,04	

	2.14.02.1.01.00 21 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	27.000.000,00	5.100.000,00	3.996.778,24	- 1.103.21,76	
	2.14.02.1.01.00 22 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	115.000.000,00	6.200.000,00	4.513.578,24	- 1.686.421,76	
	2.14.02.1.01.00 23 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	1 Laporan	32.000.000,00	5.100.000,00	3.996.778,24	- 1.103.21,76	
	2.14.02.1.01.00 26 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	55.000.000,00	5.500.000,00	3.996.778,24	- 1.503.21,76	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,01	631.500.000,00	208.900.000,00	201.239.969,44	- 7.660.030,56	
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1	351.500.000,00	47.700.000,00	43.246.412,96	- 4.453.587,04	
	2.14.03.1.01.00 07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan	1 Dokumen	27.500.000,00	14.500.000,00	13.876.428,24	- 623.571,76	

	Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal						
	2.14.03.1.01.00 09 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	1 Daerah	110.000.000,00	5.600.000,00	3.996.778,24	- 1.603.221,76	
	2.14.03.1.01.00 10 Fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	157.000.000,00	5.600.000,00	3.996.778,24	- 1.603.221,76	
	2.14.03.1.01.00 11 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	57.000.000,00	22.000.000,00	21.376.428,24	- 623.571,76	
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan	1	280.000.000,00	161.200.000,00	157.993.556,48	- 3.206.443,52	

	Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
	2.14.03.1.02.00 02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30 Organisasi	140.000.000,00	5.600.000,00	3.996.778,24	- 1.603.221,76	
	2.14.03.1.02.00 04 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	30 Organisasi	140.000.000,00	155.600.000,00	153.996.778,24	- 1.603.221,76	Dana Hibah 1. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Rp. 150.000.000
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,55	911.000.000,00	39.200.000,00	27.977.447,68	- 11.222.552,32	
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	1	552.000.000,00	22.400.000,00	15.987.112,96	- 6.412.887,04	
	2.14.04.1.01.00 16 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga	700 Keluarga	200.000.000,00	5.600.000,00	3.996.778,24	- 1.603.221,76	

	Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						
	2.14.04.1.01.00 20 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah	160.000.000,00	5.600.000,00	3.996.778,24	-1.603.221,76	
	2.14.04.1.01.00 22 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Daerah	160.000.000,00	5.600.000,00	3.996.778,24	-1.603.221,76	
	2.14.04.1.01.00 28 Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	32.000.000,00	5.600.000,00	3.996.778,24	-1.603.221,76	
	2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	359.000.000,00	16.800.000,00	11.990.334,72	-4.809.665,28	
	2.14.04.1.02.00 06 Fasilitas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	14 Kabupaten/Kota	295.000.000,00	5.600.000,00	3.996.778,24	-1.603.221,76	

	2.14.04.1.02.00 07 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kot a	1 Laporan	32.000.0 00,00	5.600.000, 00	3.996.778,2 4	- 1.603.2 21,76	
	2.14.04.1.02.00 11 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampinga n Program Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga	1 Laporan	32.000.0 00,00	5.600.000, 00	3.996.778,2 4	- 1.603.2 21,76	
GRAND TOTAL				23.101.4 09.105	14.033.776 .812,90	11.582.374. 596,98	- 2.451.4 02.215, 92	

Realisasi Keuangan Triwulan I
01 Januari 2026 Sampai 31 Maret 2026

Rekening	Uraian	ANGGARAN	Murni	Januari	Februari	Maret
		11.582.374.596,98		293.762.972,00	486.079.625,00	936.041.640,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.582.374.596,98		293.762.972,00	486.079.625,00	936.041.640,00
2 . 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.336.653.266,90		293.762.972,00	486.079.625,00	936.041.640,00
2 . 08 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.288.124.928,63		293.762.972,00	486.079.625,00	936.041.640,00
2 . 08 . 01 . 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	343.577.799,07		-	-	-
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.423.001,86		-	-	-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16.405.675,00				
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.717.214,00				
5.1.2.01.01.0029	Belanja Bahan Komputer	6.476.000,00				
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura	21.318.112,00				
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	15.906.000,00				
5.1.2.01.01.0063	Belanja Kawat/Faxilille/Internet/TV Berlangganan	21.600.000,00				
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	58.873.768,21		-	-	-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.596.875,00				
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.258.465,00				
5.1.2.01.01.0029	Belanja Bahan Komputer	6.476.000,00				
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura	8.442.428,00				
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	13.500.000,00				
5.1.2.01.01.0063	Belanja Kawat/Faxilille/Internet/TV Berlangganan	21.600.000,00				
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.557.594,00		-	-	-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.520.994,00				
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	620.000,00				

5.1.2.01.01.0029	Belanja Bahan Komputer	4.825.000,00			
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura	13.631.600,00			
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	6.960.000,00			
5.1.2.01.01.0063	Belanja Kawat/Faxilille/Internet/TV Berlangganan	18.000.000,00			
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.723.435,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	964.035,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.042.400,00			
5.1.02.01.01.0029	Bahan Komputer	14.475.000,00			
5.1.02.01.01.0043	Bahan Pakan Natura	15.912.000,00			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.630.000,00			
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	83.200.000,00			
5.1.2.01.01.0055	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	7.500.000,00			
2 . 08 . 01 . 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.073.576.115,27	293.762.972,00	486.079.625,00	915.596.973,00
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.056.287.654,27	293.762.972,00	486.079.625,00	915.596.973,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.664.947.110,00	167.814.400,00	168.329.500,00	334.318.200,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	986.708.800,00	57.887.900,00	57.887.900,00	92.186.289,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222.805.734,20	12.611.994,00	12.560.384,00	24.836.558,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	138.139.232,00	4.460.036,00	4.460.036,00	6.963.416,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	202.860.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	18.900.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	-			
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	122.549.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	17.080.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	-			
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.830.000,00	4.055.000,00	4.055.000,00	8.110.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	56.980.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00	5.721.249,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	138.217.191,00	7.893.780,00	7.821.360,00	15.497.880,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	66.916.080,00	3.693.420,00	3.693.420,00	5.721.180,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	372.936.664,58	833.420,00	15.433.439,00	30.019.576,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	8.800.000,00			
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	186.795,00	1.906,00	1.850,00	4.656,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	200.000,00	1.381,00	1.381,00	2.103,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	237.322.711,75	8.098.855,00	13.254.529,00	13.149.528,00

5.1.01.01.09.00 02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	55.853.121,28	2.639.714,00	3.059.714,00	3.059.714,00
5.1.01.01.10.00 01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.482.159,20	395.107,00	396.344,00	398.372,00
5.1.01.01.10.00 02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.368.101,12	138.937,00	138.937,00	138.937,00
5.1.01.01.11.00 01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.446.551,40	1.185.328,00	1.189.037,00	1.195.121,00
5.1.01.01.11.00 02	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.104.303,36	416.794,00	416.794,00	416.794,00
5.1.01.01.12.00 01	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.439.959,22			
5.1.01.01.12.00 02	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	5.909.140,16			
5.1.01.02.01.00 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.396.485.000,00		154.245.000,00	307.683.600,00
5.1.01.02.01.00 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	150.150.000,00		10.500.000,00	16.193.800,00
5.1.01.02.03.00 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	91.000.000,00		7.000.000,00	14.000.000,00
5.1.01.02.06.00 69	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	13.650.000,00			
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.550.061,00			
5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.800.065,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.749.996,00			
2.08.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.738.400,00			
5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.035.400,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.124.000,00			
5.1.02.01.01.00 29	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	1.619.000,00			
5.1.2.01.01.005 2	Belanja Makan Minum Rapat	6.960.000,00			
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.816.430,00	-	-	-
2.08.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.816.430,00			
5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.033.100,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.283.330,00			
5.1.02.01.01.00 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000,00			
5.1.02.01.01.00 36	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	4.200.000,00			
5.1.02.01.02.00 08	Belanja Asuransi BMD - Gedung Kantor	20.000.000,00			
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-			
5.1.02.02.12.00 03	Belanja Bimbingan Teknis				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				

2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525.327.030,57	-	-	-
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00			
5.1.02.01.01.00 29	Bahan Komputer	2.150.000,00			
5.1.02.01.01.00 31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.850.000,00			
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.238.056,12			
5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	132.777.051,00			
	Bidang 1	4.007.309,00			
	Bidang 2	3.691.227,00			
	Bidang 3	5.572.001,00			
	Bidang 4	8.672.326,00			
	Bidang 5	21.667.393,00			
	UPT	37.644.317,00			
	Perencanaan	18.375.060,00			
	SEKRETARIAT	33.147.418,00			
5.1.02.01.01.00 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.461.000,00			
	UPT	2.246.000,00			
	SEKRETARIAT	6.215.000,00			
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.956.974,45	-	-	-
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.456.974,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	40.500.000,00			
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-			
5.1.02.02.01.00 62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-			
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.255.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.255.000,00			
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.677.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.300.000,00			
5.1.02.02.01.00 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00			
5.1.02.04.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	188.377.000,00			
2.08.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	97.200.000,00	-	-	-

5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00			
5.1.02.01.01.00 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000,00			
5.1.02.02.01.00 08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	33.000.000,00			
5.1.02.02.01.00 46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	63.000.000,00			
2 . 08 . 01 . 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
2.08.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (871,015,000)	-			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
5.1.02.01.01.00 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				
5.1.02.03.02.01 17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya				
5.2.02.02.01.00 02	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-			
2.08.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (167,400,000)	-			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-			
5.1.02.01.01.00 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-			
5.1.02.02.08.00 05	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	-			
5.1.02.02.08.00 18	Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur	-			
5.2.03.01.01.00 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-			
2 . 08 . 01 . 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.077.481.153,72	-	-	20.444.667,00
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.701.405,00	-	-	-
5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.035.405,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.666.000,00			
5.1.02.01.01.00 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-			
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	246.367.908,00	-	-	-
5.1.02.02.01.00 61	Belanja Tagihan Listrik	246.367.908,00			
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	824.411.840,00	-	-	20.444.667,00
5.1.02.01.01.00 02	Belanja Bahan- Bahan Kimia	3.704.000,00			
5.1.02.01.01.00 12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.680.808,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.400.000,00			
5.1.02.01.01.00 30	Perabot Kantor	14.430.584,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.154.136,00			

5.1.02.02.01.00 25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000,00			
5.1.02.02.01.00 47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	245.000.000,00			
5.1.02.02.01.00 51	Pengelola Sampah	4.800.000,00			
5.1.02.02.01.00 80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	138.000.000,00			
5.1.02.02.01.00 82	Honorarium PBJ	12.000.000,00			
5.1.02.02.01.00 86	Belanja Jasa P3K Paruh Waktu	140.200.000,00			19.716.667,00
5.1.02.02.02.00 17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.208.000,00			728.000,00
5.1.02.02.02.00 25	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.778.660,00			
5.1.02.02.02.00 33	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.858.460,00			
5.1.02.05.02.00 01	Belanja Jasa yg diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain (outsourcing)	178.197.192,00			
2 . 08 . 01 . 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.346.400,00			
2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.346.400,00			
5.1.02.01.01.00 04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.160.000,00			
5.1.02.02.01.00 67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.075.445,00			
5.1.02.03.02.00 35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	108.110.955,00			
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00			
5.1.02.03.02.01 17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	75.000.000,00			
2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-			
5.1.02.01.01.00 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-			
5.1.02.03.03.00 01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-			
2 . 08 . 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	239.922.849,30			
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	21.895.068,00			
2.08.02.1.01.00 05	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	4.999.500,00			

5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	138.900,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.590.600,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.370.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	900.000,00			
2.08.02.1.01.00 09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	4.751.820,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	541.650,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.166.410,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.593.760,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	450.000,00			
2.08.02.1.01.00 10	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG	5.232.488,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	386.142,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.458.050,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.428.296,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	960.000,00			
2.08.02.1.01.00 11	Pendampingan Penyelenggaraan PUG	6.911.260,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	277.800,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.916.100,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.817.360,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	900.000,00			
2 . 08 . 02 . 1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	213.342.811,30			
2.08.02.1.02.00 05	Advokasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Hukum dan sosial	6.099.819,30			
5.1.02.01.01.00 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas	181.500,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	324.609,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.790.930,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.352.780,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	450.000,00			
2.08.02.1.02.00 08	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik	203.108.960,00			

	Hukum dan sosial				
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	152.790,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.458.050,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.498.120,00			
5.1.05.05.02.00 01	HIBAH BKOW 100 dan DWP 100	200.000.000,00			
2.08.02.1.02.00 09	Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Hukum dan sosial	4.134.032,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	177.792,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.996.240,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	960.000,00			
2 . 08 . 02 . 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	4.684.970,00			
2.08.02.1.03.00 08	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	4.684.970,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	215.295,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.635,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.549.040,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	900.000,00			
2 . 08 . 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	303.103.258,97			
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.451.655,00			
2.08.03.1.01.00 03	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	6.551.665,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	501.665,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	900.000,00			
2.08.03.1.01.00 04	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	4.166.665,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	441.665,00			
5.1.02.01.01.00	Benda Pos/Materai				

27		100.000,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	450.000,00			
2.08.03.1.01.00 05	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	3.556.665,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	381.665,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.900.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	450.000,00			
2.08.03.1.01.00 06	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	5.993.330,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	793.330,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	750.000,00			
2.08.03.1.01.00 07	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	7.183.330,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	883.330,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	1.200.000,00			
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	171.184.564,62			
2.08.03.1.02.00 03	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	1.950.000,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000,00			
2.08.03.1.02.00 04	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan	9.000.000,00			

	Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota				
5.1.02.02.01.00 05	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi ahli dan beracara	9.000.000,00			
2.08.03.1.02.00 05	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	39.277.800,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	277.800,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	39.000.000,00			
2.08.03.1.02.00 07	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	20.331.690,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.456.690,00			
5.1.02.04.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.875.000,00			
2.08.03.1.02.00 08	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	50.625.074,62			
5.1.02.01.01.00 02	Belanja Bahan Kimia	3.100.000,00			
5.1.02.01.01.00 04	Belanja BBM	6.400.000,00			
5.1.02.01.01.00 12	Belanja Bahan Lainnya	18.814.592,00			
5.1.02.01.01.00 25	Belanja Kertas	516.708,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Cetak	3.396.730,00			
5.1.02.01.01.00 30	Belanja Perabot Kantor	2.697.724,00			
5.1.02.01.01.00 31	Belanja Alat Listrik	3.600.000,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.499.320,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	3.600.000,00			
5.1.02.01.01.00 59	Belanja Tagihan Telepon	5.000.000,00			
2.08.03.1.02.00 09	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	50.000.000,00			
5.1.02.01.01.00 12	Belanja Bahan Lainnya	48.310.200,00			
5.1.02.01.01.00 36	Belanja Bahan Lainnya Tas Paket	1.689.800,00			
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	104.467.039,35			
2.08.03.1.03.00 05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	90.451.579,35			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.380.000,00			

5.1.02.01.01.00 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	520.000,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.216.000,00			
5.1.02.02.05.00 09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	63.580.000,00			
5.1.02.02.12.00 03	Belanja Bimbingan Teknis	13.955.579,00			
5.1.02.04.01.00 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.800.000,00			
2.08.03.1.03.00 06	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	2.716.065,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	816.065,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	300.000,00			
2.08.03.1.03.00 07	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1.191.665,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	291.665,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	300.000,00			
2.08.03.1.03.00 08	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1.691.665,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	291.665,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	600.000,00			
2.08.03.1.03.00 09	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	8.416.065,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	816.065,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.300.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	700.000,00			
2 . 08 . 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	6.339.480,00			
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	6.339.480,00			
2.08.04.1.01.00 04	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas	2.859.960,00			

	keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten Kota				
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	41.670,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	874.830,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.643.460,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	300.000,00			
2.08.04.1.01.00 07	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten Kota	3.479.520,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	41.670,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	874.830,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.113.020,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	450.000,00			
2 . 08 . 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	34.664.890,00			
2.08.05.1.01	Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	34.664.890,00			
2.08.05.1.01.00 03	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	2.898.160,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	41.670,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	874.830,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.531.660,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	450.000,00			
2.08.05.1.01.00 05	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	31.766.730,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	250.020,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.624.490,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.442.220,00			
5.1.02.02.01.00 04	Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana	27.000.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	450.000,00			
2 . 08 . 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	74.067.860,00			

2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	25.559.920,00			
2.08.06.1.01.00 07	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	18.447.360,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	986.190,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.191.590,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.669.580,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	600.000,00			
2.08.06.1.01.00 8	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	7.112.560,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	777.840,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.499.320,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.235.400,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	600.000,00			
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	48.507.940,00			
2.08.06.1.02.00 07	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	48.507.940,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.722.360,00			
5.1.02.01.01.00 36	Belanja Bahan Kantor Lainnya/Seminar Kit	4.500.000,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.624.780,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.260.800,00			
5.1.02.02.01.00 25	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	3.300.000,00			
5.1.02.02.04.01 17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.100.000,00			
2 . 08 . 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	390.430.000,00			
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	107.509.180,00			
2.08.07.1.01.00 07	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	103.000.000,00			

5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.400.000,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.240.000,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000,00			
5.1.02.04.01.00 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.960.000,00			
2.08.07.1.01.00 10	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	4.509.180,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	319.470,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	874.830,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.414.880,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	900.000,00			
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	282.920.820,00			
2.08.07.1.02.00 08	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	122.430.820,00			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.905.820,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.650.000,00			
5.1.02.04.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	107.875.000,00			
2.08.07.1.02.00 10	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	80.000.000,00			
5.1.02.04.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.000.000,00			
2.08.07.1.02.00 11	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	16.200.000,00			
5.1.02.02.01.00 05	Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara	16.200.000,00			
2.08.07.1.02.00 12	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	4.290.000,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.210.000,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.080.000,00			
2.08.07.1.02.00 14	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	60.000.000,00			
5.1.02.01.01.00 12	Belanja bahan-Benda lainnya	60.000.000,00			

2 . 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	245.721.330,08			
2 . 14 . 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	16.503.912,96			
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	16.503.912,96			
2.14.02.1.01.00 21	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.02.1.01.00 22	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	4.513.578,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	516.800,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.02.1.01.00 23	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.02.1.01.00 26	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2 . 14 . 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	201.239.969,44			
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program. Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	43.246.412,96			
2.14.03.1.01.00 07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	13.876.428,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	12.500.000,00			

2.14.03.1.01.00 09	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.03.1.01.00 10	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.03.1.01.00 11	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21.376.428,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.01.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/ reklame dan pemotretan	20.000.000,00			
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	157.993.556,48			
2.14.03.1.02.00 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.03.1.02.00 04	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana	153.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
5.1.05.05.06.00 01	HIBAH PKBI	150.000.000,00			
2 . 14 . 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	27.977.447,68			
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	15.987.112,96			
2.14.04.1.01.00 16	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	3.996.778,24			

5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.04.1.01.00 20	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.04.1.01.00 22	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.04.1.01.00 28	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.04.1.02		11.990.334,72			
2.14.04.1.02.00 06	Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.04.1.02.00 07	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten kota	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			
2.14.04.1.02.00 11	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3.996.778,24			
5.1.02.01.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.376.428,00			
5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.620.350,00			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
01 Januari 2026 Sampai 31 Maret 2026

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2026	% 2026
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
5	BELANJA DAERAH	11.582.374.596,98	1.715.884.237,00	14,81
5.1	BELANJA OPERASI	11.582.374.596,98	1.715.884.237,00	14,81
5.1.01	Belanja Pegawai	8.056.287.654,27	1.695.439.570,00	21,04
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.405.002.654,27	1.185.817.170,00	21,93
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	3.651.655.910,00	878.424.189,00	24,05
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.664.947.110,00	670.462.100,00	25,15
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	986.708.800,00	207.962.089,00	21,07
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	360.944.966,20	65.892.424,00	18,25
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222.805.734,20	50.008.936,00	22,44
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	138.139.232,00	15.883.488,00	11,49
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	202.860.000,00	37.800.000,00	18,63
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	202.860.000,00	37.800.000,00	18,63
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	122.549.000,00	34.160.000,00	27,87
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	122.549.000,00	34.160.000,00	27,87
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan	131.810.000,00	29.231.249,00	22,17

	Fungsional Umum ASN			
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.830.000,00	16.220.000,00	21,67
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	56.980.000,00	13.011.249,00	22,83
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	205.133.271,00	44.321.040,00	21,60
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	138.217.191,00	31.213.020,00	22,58
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	66.916.080,00	13.108.020,00	19,58
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	381.736.664,58	46.286.435,00	12,12
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	372.936.664,58	46.286.435,00	12,41
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	8.800.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	386.795,00	13.277,00	3,43
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	186.795,00	8.412,00	4,50
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	200.000,00	4.865,00	2,43
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	293.175.833,03	43.262.054,00	14,75
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	237.322.711,75	34.502.912,00	14,53
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	55.853.121,28	8.759.142,00	15,68
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.850.260,32	1.606.634,00	18,15
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.482.159,20	1.189.823,00	18,35
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.368.101,12	416.811,00	17,60
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.550.854,76	4.819.868,00	20,46
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.446.551,40	3.569.486,00	21,70
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.104.303,36	1.250.382,00	17,60
5.1.01.01.012	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	22.349.099,38	0,00	0,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.439.959,22	0,00	0,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	5.909.140,16	0,00	0,00

5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.651.285.000,00	509.622.400,00	19,22
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.546.635.000,00	488.622.400,00	19,18
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.396.485.000,00	461.928.600,00	19,27
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	150.150.000,00	26.693.800,00	17,77
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	91.000.000,00	21.000.000,00	23,07
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	91.000.000,00	21.000.000,00	23,07
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.650.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.650.000,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.176.086.942,71	20.444.667,00	0,64
5.1.02.01	Belanja Barang	936.199.877,36	0,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	936.199.877,36	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.804.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.560.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	133.805.600,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	177.168.605,12	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	698.208,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	117.290.993,45	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.520.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	44.482.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.128.308,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.450.000,00	0,00	0,00

5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.389.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	59.304.141,07	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	302.598.221,72	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.460.211.918,35	20.444.667,00	1,40
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	1.342.731.219,00	19.716.667,00	1,46
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	160.567.866,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	25.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	33.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	20.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	63.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	245.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	141.320.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	246.367.908,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	61.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.075.445,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	138.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	140.200.000,00	19.716.667,00	14,06

	Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis			
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.845.120,00	728.000,00	2,21
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00017	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	9.208.000,00	728.000,00	7,90
5.1.02.02.002.00025	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	1.778.660,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002.00033	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	1.858.460,00	0,00	0,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.100.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.100.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	63.580.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	63.580.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.955.579,35	0,00	0,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	13.955.579,35	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	183.110.955,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183.110.955,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	108.110.955,00	0,00	0,00
5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	418.367.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	418.367.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	388.127.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.240.000,00	0,00	0,00

5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	178.197.192,00	0,00	0,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	178.197.192,00	0,00	0,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	178.197.192,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.582.374.596,98	1.715.884.237,00	14,81
	JUMLAH BELANJA	11.582.374.596,98	1.715.884.237,00	14,81
	SURPLUS/DEFISIT	(11.582.374.596,98)	(1.715.884.237,00)	14,81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(11.582.374.596,98)	(1.715.884.237,00)	14,81

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan I adalah:

1. Masih kurangnya kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak.
2. Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses bagi perempuan dalam pembangunan, memperoleh pendidikan dan pelatihan.
3. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik.
5. Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender.
6. Keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Kalimantan Tengah belum mencapai 30%, sehingga diperlukan sosialisasi/ pelatihan/ bimtek untuk calon anggota legislatif khusus perempuan.
7. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi

masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender.

8. Belum optimalnya sistem pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan.
9. Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data.
10. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor.
11. Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam pemenuhan hak anak yang dituangkan dalam 5 klaster 1 kelembagaan, yang tertuang dalam 24 indikator kabupaten/kota layak anak sebagai upaya pemenuhan hak anak.
12. Belum semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada Tahun 2024 ada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA, 5 (lima) yang mendapatkan predikat Pratama (Palangka Raya, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Sukamara), 2 (dua) yang mendapatkan predikat Madya (Pulang Pisau, dan Kapuas).
13. Masih banyak SDM yang belum memiliki sertifikat Konvensi Hak Anak (KHA).
14. Minimnya fasilitasi atas informasi Layak Anak.
15. Kurangnya sosialisasi terkait Forum Anak Daerah (FAD) sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).
16. Dukungan anggaran yang kecil dari pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan KLA di Kabupaten/Kota.
17. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
18. Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan belum optimalnya peran kelembagaan Perlindungan Hak Anak .
19. Kurang maksimalnya unit layanan pada kabupaten/kota.
20. Petugas Operator Simfoni PPA kabupaten/kota masih belum sepenuhnya menginput layanan yang diberikan kepada korban ke Simfoni PPA.
21. Kurangnya kapasitas SDM pada unit layanan di Kabupaten/Kota yang membutuhkan tenaga profesional yang memiliki sertifikat keahlian terutama yang berkaitan dengan hal mediasi dan konseling.
22. Kurangnya Anggaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha dan inovasi.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2026 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah perlu upaya – upaya dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

B. Tindaklanjut

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
2. Perlunya dukungan, advokasi dan anggaran dalam pencapaian target di Kalimantan Tengah, dalam hal Peningkatan Perekonomian Perempuan,

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak (lintas sektor terkait gugus tugas KLA)

3. Kontribusi dalam ekonomi dan segi sumbangan pendapatan perempuan perlu ditingkatkan lagi.
4. Perlunya peningkatan Keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Kalimantan Tengah agar mencapai 30%, dengan sosialisasi/ pelatihan/ bimtek untuk calon anggota legislatif khusus perempuan.
5. Perlunya peningkatan pemberdayaan perempuan sebagai pengambil keputusan dan bagi pemilih usia dewasa dengan sosialisasi/ pelatihan/ bimtek.
6. Perlunya dukungan dan kerjasama antara SOPD terkait dalam hal penyediaan Data Gender dan Anak.
7. Perlunya bimtek Konvensi Hak Anak (KHA) bagi SDM disetiap klaster untuk kabupaten/kota.
8. Menambah jumlah tenaga profesional yang bersertifikat dengan melibatkan tenaga pendamping pada pelatihan dan uji kompetensi.
9. Meningkatkan kapasitas SDM melalui Capacity Building tentang pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
10. Menambah SDM pada layanan UPT yang sesuai standar.
11. Penambahan Anggaran baik dari APBD maupun DAK untuk:
 - Upaya Pencegahan dengan melakukan Perumusan Kebijakan, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Sosialisasi serta Advokasi.
 - Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelayanan serta Penjangkauan Kasus.
12. Peningkatan Kapasitas SDM pada Unit Layanan dengan mengadakan atau mengikutsertakan pada Pelatihan Bersertifikasi.
13. Pengajuan usulan bantuan berupa Torlin (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Kementerian PPPA RI kepada UPTD PPA di kabupaten wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum memiliki Torlin dan Molin dalam rangka mendukung pelayanan dan penjangkauan korban kekerasan di daerah.
14. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait klaster 1-5 dan Kelembagaan dalam pengumpulan data untuk penilaian Evaluasi KLA.
15. Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan ke Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Penilaian Evaluasi KLA

16. Bertambahnya SRA, RIRA, PRAP, RBRA, PISA dan PKA yang terstandardisasi.
17. Terlaksananya pelatihan 2P (Pelopor dan Pelapor) bagi Forum Anak.
18. Terlaksananya pelatihan PATBM di kabupaten/kota sebagai bagian dari kelurahan/desa dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
19. Dukungan anggaran yang cukup dari pemerintah daerah kabupaten/kota guna pencapaian KLA.
20. Perlu memperkuat UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Propinsi maupun kabupaten dan kota se Kalimantan Tengah, dalam sarana, prasarana dan tenaga yang berkompeten sehingga pelayanan yang dilaksanakan dapat maksimal. Perlu adanya Promosi dan informasi dalam menginformasikan telah adanya tempat Perlindungan perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, yang juga melakukan pelayanan via Hotline kepada Masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata capaian sebesar 100,85% dari seluruh target yang ditetapkan.

Keberhasilan Dinas ini tidak hanya diukur dari pencapaian indikator output triwulan dan tahunan semata, melainkan juga dari dampak jangka panjang yang bersifat strategis. Indikator outcome dan impact yang menjadi tujuan utama Dinas pada hakikatnya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk diukur, serta menjadi tanggung jawab bersama seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Dinas yang menempatkan isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan, dan keluarga berencana sebagai bagian integral dari setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan gender serta perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 09 April 2026

PIH KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SURYANTO, Aks., M.Si

NIP. 19730108 199403 1 006

DINAS P3A-PPKB	
SEK/KABID	sp
KA. SUB BAG/SEKSI	
PELAKSANA	sa..

1. Plt Kabid sp

sa sa. jr ls. jr

LAMPIRAN

Dokumentasi Rapat

